

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). *Pembangunan Daerah, Desa dan Kota*. Jakarta: Bappenas. [Online]. Tersedia: <https://bappenas.go.id/>. (diakses tanggal 27 Februari 2019).
- Badan Pusat Statistika, 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi DKI Jakarta 2010-2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. [Online]. Tersedia: <https://jakarta.bps.go.id/>. (diakses tanggal 10 Februari 2019).
- _____, 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Barat 2010-2017*. Bandung: Badan Pusat Statistik. [Online]. Tersedia: <https://jabar.bps.go.id/>. (diakses tanggal 10 Februari 2019).
- _____, 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah 2010-2017*. Semarang: Badan Pusat Statistik. [Online]. Tersedia: <https://jateng.bps.go.id/>. (diakses tanggal 10 Februari 2019).
- _____, 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi D.I. Yogyakarta 2010-2017*. Bantul: Badan Pusat Statistik. [Online]. Tersedia: <https://yogyakarta.bps.go.id/>. (diakses tanggal 11 Februari 2019).
- _____, 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Timur 2010-2017*. Surabaya: Badan Pusat Statistik. [Online]. Tersedia: <https://jatim.bps.go.id/>. (diakses tanggal 11 Februari 2019).
- _____, 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Banten 2010-2017*. Serang: Badan Pusat Statistik. [Online]. Tersedia: <https://banten.bps.go.id/>. (diakses tanggal 12 Februari 2019).
- _____, 2017. *Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi 2006-2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. [Online]. Tersedia: <https://bps.go.id/>. (diakses tanggal 10 Februari 2019).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2010. *Realisasi APBD 2010*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. [Online]. Tersedia: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. (diakses tanggal 13 Februari 2019).

- _____, 2011. *Realisasi APBD 2011*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. [Online]. Tersedia: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. (diakses tanggal 12 Februari 2019).
- _____, 2012. *Realisasi APBD 2012*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. [Online]. Tersedia: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. (diakses tanggal 12 Februari 2019).
- _____, 2013. *Realisasi APBD 2013*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. [Online]. Tersedia: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. (diakses tanggal 12 Februari 2019).
- _____, 2014. *Realisasi APBD 2014*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. [Online]. Tersedia: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. (diakses tanggal 12 Februari 2019).
- _____, 2015. *Realisasi APBD 2015*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. [Online]. Tersedia: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. (diakses tanggal 12 Februari 2019).
- _____, 2016. *Realisasi APBD 2016*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. [Online]. Tersedia: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. (diakses tanggal 12 Februari 2019).
- _____, 2017. *Realisasi APBD 2017*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. [Online]. Tersedia: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. (diakses tanggal 12 Februari 2019).
- Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter. (2015). *Metadata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*. Jakarta: Bank Indonesia. [Online]. Tersedia: <https://www.bi.go.id/>. (diakses tanggal 18 Februari 2019).
- Edianto, M. (2017). “Analisis Pengaruh Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Pengeluaran Pemerintah, terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau Periode 2004-2015”. *JOM Fekon* 4. (1). 1785-1799.
- Faizal. (2018). Pengertian Desentralisasi Fiskal dan Penjelasannya. [Online]. Tersedia: <https://www.sharingid.com/>. (diakses tanggal 17 April 2019).
- Falah, B.Z., et al (2006). “Model Regresi Data Panel Simultan dengan Variabel Indeks Harga yang Diterima dan yang Dibayar Petani”. *Jurnal Gaussian* 5. (4). 611-621.

- MoF News. (2010). *Dana Transfer ke Daerah Terus Meningkatkan dari Tahun ke Tahun*. [Online]. Tersedia: <http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dana-transfer-ke-daerah-terus-meningkat-dari-tahun-ke-tahun/>. (diakses tanggal 5 Mei 2019)
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. [Online]. Tersedia: <https://www.djpk.depkeu.go.id/>. (diakses tanggal 17 Februari 2019).
- Raharjo, S. (2017). *Makna Koefisien Determinasi [R square] dalam Analisis Regresi Linier*. [Online]. Tersedia: <https://www.spssindonesia.com/2017/04/makna-koefisien-determinasi-r-square.html?m=1>. [diakses tanggal 10 Maret 2019].
- Rarung, P. (2016). "Pengaruh PAD dan DAU terhadap PDRB di Kota Manado". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16. (3). 449-460.
- Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi Teori Pengantar* (edisi ketiga). Jakarta: Rajawali Pers.
- Sun'an, M. (2015). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Suparmoko (2002). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah* (edisi pertama). Yogyakarta: Andi.
- Suryana (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. [Online]. Tersedia: <https://www.jdih.kemenkeu.go.id/>. (diakses tanggal 2 Maret 2019).
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. [Online]. Tersedia: <https://www.jdih.karangasembkab.go.id/>. (diakses tanggal 1 Maret 2019).
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. [Online]. Tersedia: <https://www.bi.go.id/>. (diakses tanggal 1 Maret 2019).
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. [Online]. Tersedia: <https://www.djpk.depkeu.go.id/>. (diakses tanggal 5 Maret 2019).
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi

Daerah. [Online]. Tersedia: <https://www.djpk.depkeu.go.id/>. (diakses tanggal 5 Maret 2019).

Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. [Online]. Tersedia: <https://www.djpk.depkeu.go.id/>. (diakses tanggal 5 Maret 2019).